

ANALISIS TAHAP SADAR PENYULUH KB TERHADAP PENINGKATAN AKSEPTOR METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DI KABUPATEN PANGANDARAN

Asep Rustandi¹, Ahmad Juliars², Sahadi³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : aseprustandi82@student.unigal.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Pangandaran, meskipun pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melaksanakan berbagai program penyuluhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas tahap sadar (awareness) dalam penyuluhan KB terhadap peningkatan partisipasi akseptor MKJP. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama, yaitu adanya informasi dari penyuluhan, penyuluhan KB telah menyampaikan informasi terkait MKJP melalui berbagai kegiatan seperti kunjungan rumah dan forum kelompok, tetapi penyebarannya belum merata dan belum semua masyarakat memahami secara utuh. Indikator kedua, yaitu adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluhan, menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluhan belum mampu mengemas MKJP sebagai solusi yang menarik, karena terbatasnya pelatihan komunikasi, kurangnya media promosi, dan belum adanya pendekatan berbasis budaya lokal. Hambatan utama dalam pelaksanaan tahap awareness adalah terbatasnya jumlah penyuluhan, luasnya wilayah kerja, dan rendahnya daya inovasi dalam pendekatan komunikasi. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa tahap sadar dalam penyuluhan KB belum terlaksana secara optimal dilihat dari indikator yaitu pengumpulan data dan analisa data. Diperlukan penguatan kapasitas penyuluhan, pengembangan strategi komunikasi berbasis kultural, serta dukungan kelembagaan agar partisipasi akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dapat meningkat secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci : Awareness, Partisipasi, Akseptor dan Kabupaten Pangandaran.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan bagian integral dari pembangunan kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengendalian kelahiran dan pembentukan keluarga sejahtera. Salah satu metode kontrasepsi yang direkomendasikan adalah Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), karena efektivitasnya yang tinggi, efisiensi biaya, serta dampak jangka panjang yang positif terhadap kesehatan reproduksi perempuan (BKKBN, 2022). Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat terhadap MKJP masih tergolong rendah di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pangandaran tahun 2022, dari 11.490 pasangan usia subur (PUS) yang tercatat sebagai akseptor baru, hanya 1.203 orang atau sekitar 10,47% yang memilih MKJP, sementara 10.287 orang atau 89,53% memilih metode kontrasepsi non-MKJP. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran yang memadai terhadap pentingnya penggunaan MKJP sebagai bentuk perencanaan keluarga yang lebih berkelanjutan (DP2KBP3A, 2022).

Kesadaran masyarakat atau *awareness* terhadap program MKJP merupakan bagian awal dari proses

perubahan perilaku yang sangat penting. Menurut Notoadmodjo (2007), *awareness* adalah tahap pertama dari lima tahapan penyuluhan kesehatan, yang meliputi sadar (*awareness*), minat (*interest*), menilai (*evaluation*), mencoba (*trial*), dan menerima (*adoption*). Tahap kesadaran ini menekankan pentingnya keberhasilan penyuluhan dalam memperkenalkan suatu inovasi kesehatan agar diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat. Jika tahap ini tidak tercapai, maka tahap-tahap berikutnya dalam proses adopsi inovasi tidak akan berjalan efektif.

Peran penyuluhan KB di lapangan menjadi sangat sentral dalam membangun *awareness* masyarakat terhadap MKJP. Dalam praktiknya, penyuluhan dituntut untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangun komunikasi dua arah yang persuasif dan berbasis pada kebutuhan lokal. Namun, berdasarkan observasi awal di beberapa wilayah kerja penyuluhan di Kabupaten Pangandaran, ditemukan bahwa kegiatan penyuluhan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau semua segmen masyarakat, terutama kelompok perempuan usia subur yang menjadi target utama program.

Kondisi ini menandakan bahwa tahap kesadaran dalam proses penyuluhan belum sepenuhnya efektif. Rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap MKJP tidak hanya disebabkan oleh faktor

pengetahuan yang terbatas, tetapi juga oleh rendahnya kualitas interaksi antara penyuluhan dan masyarakat dalam proses komunikasi perubahan perilaku. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peran penyuluhan KB dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap program MKJP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran penyuluhan KB dalam meningkatkan kesadaran (*awareness*) akseptor terhadap program MKJP di Kabupaten Pangandaran. Fokus penelitian ini adalah pada strategi penyampaian informasi, pendekatan komunikasi, serta hambatan yang dihadapi penyuluhan dalam membangun kesadaran masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pelaksanaan program penyuluhan KB yang lebih sistematis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal.

Teori penuluhan menurut Mardikanto (2014:20) penyuluhan dapat di artikan adalah suatu kegiatan memberikan pendidikan atau penjelasan sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberikan pengetahuan, informasi - informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan prilaku hidup seharusnya

Menurut Notoadmodjo dalam bukunya Martina, dkk, 2021:5, 5 tahapan proses penyuluhan : (1) Tahap sadar (arwarness), (2) Tahap minat (interest), (3) Tahap menilai (evaluation), (4) Tahap mencoba (trial), (5) Tahap penerapan atau adopsi

(adoption).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran penyuluhan lapangan dalam meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Menurut Sugiyono (2016), penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman secara menyeluruh terhadap fenomena sosial melalui proses pengumpulan data yang bersifat natural dan kontekstual, tanpa memanipulasi variabel yang diteliti.

Mengacu pada teori Notoadmodjo (2007), tahap *awareness* merupakan fase awal dari lima tahapan proses penyuluhan, yang ditandai dengan adanya pengenalan informasi baru kepada individu atau kelompok sasaran sehingga menimbulkan perhatian dan kesadaran terhadap suatu inovasi kesehatan. Tahap ini mencakup indikator seperti adanya informasi dari penyuluhan serta pengenalan inovasi (dalam hal ini MKJP) kepada masyarakat secara persuasif dan komunikatif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari 10 informan menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiono) melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kegiatan penyuluhan di

lapangan, wawancara mendalam dengan penyuluhan KB dan akseptor, serta dokumentasi terhadap laporan program dan data partisipasi MKJP. Teknik analisis data yang digunakan mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dan hubungan antarfenomena dalam penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Informasi dari pihak penyuluhan

Berdasarkan penelitian pada indikator ini, dapat ditinjau dari sudut pandang tahap sadar (*awarness*), khususnya terkait dengan tujuan penyuluhan lapangan dalam meningkatkan partisipasi akseptor MKJP dapat dikatakan sudah berjalan. Secara garis besar dapat diuraikan bahwa tujuan penyuluhan lapangan telah dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PDKBP3A Kabupaten Pangandaran yang dihadiri oleh pihak pemangku kepentingan dan direncanakan oleh semua pihak termasuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Peran Penyuluhan Lapangan Dalam Meningkatkan Partisipasi Akseptor MKJP Kabupaten Pangandaran adalah terlebih dahulu membuat peraturan kebijakan Dinas DKB3A yaitu dengan cara membuat suatu peraturan dan kebijakan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat antara

pemerintah/petugas penyuluhan, masyarakat sekitar dan calon akseptor/ masyarakat atau berbagai pihak namun adanya permasalahan yaitu Pemberian informasi baik sebagai fasilitator maupun sebagai motivator dalam memberikan ajakan atau memberikan himbauan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk ikut menjadi peserta KB.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan berkaitan dengan maka informasi baik sebagai fasilitator maupun sebagai motivator dalam memberikan ajakan atau memberikan himbauan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk ikut menjadi peserta KB dan masyarakat mengerti atas peraturan pemerintah dalam pelaksanaan KB.

Berdasarkan hasil penelitian pada peran penyuluhan lapangan oleh dinas DKB3A, Tahap sadar (*awarness*) maka dalam tujuan penyuluhan lapangan adalah harus sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui dinas DKB3A yang telah sepakati bersama sehingga dalam penentuan standar sesuai dengan tujuan peran penyuluhan lapangan akseptor MKJP.

Menurut Notoatmodjo (Wijayanti & Raidanti, 2022:30) Metode Penyuluhan:

Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan

sebagainya melalui kegiatan yang disebut Pendidikan atau promosi kesehatan.

Menurut Undang – Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga penyuluhan keluarga keberencana adalah merupakan ujung tombak pengelola KB di sektor lapangan. Di lihat dari tugas dan pokok fungsinya jabatan Petugas Lapangan KB adalah juru penerang atau agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi mendukung program keluarga berencana dari tidak berpartisipasi menjadi berpartisipasi dan berperan serta aktif.

Berdasarkan dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan adalah bahwa peran penyuluhan lapangan merupakan bagian dari program dinas DKBP3A dimana setiap peran penyuluhan merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi karena sangat penting sekali namun pada dasarnya tergantung terhadap pemanfaatan sumber daya fisik dan melalui manusia yang secara terkoordinasi guna pencapai tujuan yang efektif dan efisien

b. Inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut pandang Tahap sadar (*awarness*) khususnya terkait dengan indikator informasi dari pihak penyuluhan dapat dikatakan cukup baik. Secara garis besar dapat diuraikan bahwa tujuan

peran penyuluhan lapangan telah dilakukan melalui peraturan dan musyawarah yang dihadiri oleh pihak pemangku kepentingan dan direncanakan oleh semua pihak termasuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa informasi yang dibutuhkan maka masih terbatas untuk inovasi yang ditawarkan oleh penyuluhan belum sesuai harapan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Kebijakan Pemerintah melalui Dinas DKBP3A Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan standar kualitas SDM petugas, diketahui minimnya informasi tentang akseptor MKJP dan belum maksimal guna mencapai tujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada peran penyuluhan lapangan oleh dinas DKBP3A, Tahap sadar (*awareness*) maka dalam tujuan penyuluhan lapangan adalah harus sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui dinas DKBP3A yang telah sepakati bersama sehingga dalam penentuan standar sesuai dengan tujuan peran penyuluhan lapangan akseptor MKJP.

Menurut Notoatmodjo (Wijayanti & Raidanti, 2022:30) mengemukakan:

Metode Penyuluhan adalah upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan

kesadaran, dan sebagainya melalui kegiatan yang disebut Pendidikan atau promosi kesehatan.

Menurut Undang – Undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga penyuluhan keluarga keberencana adalah merupakan ujung tombak pengelola kb di sector lapangan. Di lihat dari tugas dan pokok fungsinya jabatan Petugas Lapangan KB adalah juru penerang atau agent of change pada keluarga dan masyarakat luas menuju perubahan mentalitet dari tidak mendukung menjadi mendukung program keluarga berencana dari tidak berpartisipasi menjadi berpartisipasi dan berperan serta aktif.

Berdasarkan dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan adalah bahwa peran penyuluhan lapangan merupakan bagian dari program dinas DKBP3A dimana setiap peran penyuluhan merupakan upaya untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi karena sangat penting sekali namun pada dasarnya tergantung terhadap pemanfaatan sumber daya fisik dan melalui manusia yang secara terkoordinasi guna pencapai tujuan yang efektif dan efisien

KB telah melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan seperti kunjungan rumah, posyandu, dan pertemuan kelompok. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan MKJP, jenis-jenis alat kontrasepsi, manfaat, serta efektivitas jangka panjangnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tahap awareness masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu yang paling menonjol adalah belum meratanya distribusi informasi akibat keterbatasan jumlah penyuluhan, luas wilayah kerja, dan hambatan geografis yang menyulitkan akses informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kemampuan penyuluhan dalam memperkenalkan MKJP sebagai sebuah inovasi yang menarik dan solutif masih perlu ditingkatkan. Minimnya pelatihan serta kurangnya pemanfaatan media penyuluhan menyebabkan pendekatan komunikasi yang digunakan belum mampu mengubah persepsi negatif atau keraguan masyarakat terhadap MKJP. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan metode kontrasepsi non-MKJP karena kurangnya pemahaman yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan belum sepenuhnya berperan sebagai agen perubahan yang inovatif dan responsif. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan tahap awareness, dibutuhkan penguatan kapasitas penyuluhan melalui pelatihan intensif, penyediaan media komunikasi yang menarik, serta strategi pendekatan

KESIMPULAN

Hasil Penelitian diketahui bahwa tahap sadar (awareness) dalam penyuluhan KB belum optimal dilihat dari indikator yang diukur terhadap peningkatan partisipasi akseptor MKJP di Kabupaten Pangandaran. Penyuluhan

yang berbasis kultural. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyuluhan KB dapat membentuk kesadaran yang kuat di masyarakat dan secara langsung meningkatkan partisipasi dalam program MKJP secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Nana. 2020. Peran Penyuluhan Agama Dan Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Pencapaian Program KB Di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2022). *Laporan tahunan program keluarga berencana nasional*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2015. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Cetakan ke- 5. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran. (2022). *Data partisipasi akseptor MKJP tahun 2022*. Pangandaran: DP2KBP3A.
- Ernawati, Susi. 2016. Faktor yang Memengaruhi Keluarga Berencana (KB) Pria dengan Paritisipasi Pria dalam Keluarga Berencana di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu II.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Notoadmodjo, S. (2007). *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pedoman program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dengan stiker oleh Depkes RI (2019)
- Peran Penyuluhan Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Keikutsertaan Masyarakat Mengikuti Program Kb Di Kabupaten Nias Ba t Tahun 2022 oleh T. An (2023).
- Profil Kesehatan Tahun 2015 oleh BKKBN (2016).
- Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Dalam Mewujudkan Program KB Di Desa Sumber Rejo Kecamatan Bangkunat.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Wijayanti, I. N., & Raidanti, M. D. (2022). *Pendidikan kesehatan masyarakat: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Andi.